



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG



Unggul
Bereputasi
Internasional

Ilmu | Integritas | Kemanfaatan

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025 – 2028

“Bersinergi untuk Masyarakat Taat Hukum,
DUDI Berdaya, Negara Berkeadilan”



Pemetaan &
Fondasi
2025



Penguatan
Kapasitas
2026



Inovasi &
Implementasi
2027



Hilirisasi &
Keberlanjutan
2028

*Dari Kampus untuk
Masyarakat yang Lebih Baik*

HUKUM BERBASIS NILAI
SOLUSI UNTUK NEGERI



ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Manfaat	6
 BAB II ROADMAP DAN ARAH STRATEGIS PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
A. Arah Strategi Pengembangan PkM.....	8
B. Prinsip Pengembangan PkM HTN Berbasis DUDI	8
C. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	9
D. Sasaran dan Mitra Pengabdian	10
E. Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat 2025-2928.....	10
F. Fokus Program Tahunan	11
G. Integrasi Dosen dan Mahasiswa	13
H. Indikator Keberhasilan dann Luaran	14
I. Strategi Implementasi	14
J. Target Akhir Roadmap 2028.....	15
 BAB III PENUTUP	16

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024–2027 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya.

Penyusunan roadmap ini merupakan bagian dari ikhtiar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam memberikan arah yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan bagi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi. Roadmap ini diharapkan menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang selaras dengan kompetensi keilmuan Hukum Tata Negara dan Siyasah serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024–2027 secara khusus diarahkan pada pengembangan pengabdian yang memiliki keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) tanpa menghilangkan kekhasan keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah). DUDI ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan dan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan regulasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perizinan, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak masyarakat, ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Melalui roadmap ini, pengembangan PkM dilaksanakan secara bertahap dalam empat periode utama, yaitu Pemetaan dan Fondasi pada tahun 2024, Penguatan Kapasitas pada tahun 2025, Inovasi dan Implementasi pada tahun 2026, serta Hilirisasi dan Keberlanjutan pada tahun 2027. Keseluruhan tahapan tersebut diarahkan untuk membangun sinergi antara Program Studi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri sehingga pada akhir periode dapat terbentuk Model Pengabdian Masyarakat HTN–DUDI yang menjadi salah satu kekhasan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Kami menyadari bahwa penyusunan roadmap ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, arahan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., atas arahan, dukungan, dan kebijakan dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi serta penguatan budaya akademik dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., atas arahan, dukungan, dan fasilitasi dalam pengembangan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan pemikiran, masukan, dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan roadmap ini.

Kami menyadari bahwa Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024–2027 dapat menjadi pedoman yang implementatif bagi dosen dan mahasiswa serta mampu memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dan DUDI. Semoga seluruh ikhtiar ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya masyarakat yang taat hukum, DUDI yang berdaya, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bernegara yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan, dan keberkahan atas setiap ikhtiar yang dilakukan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, September 2026

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Penyusunan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025 - 2028 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan yang mengatur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat. Dasar hukum diperlukan untuk memastikan bahwa arah, sasaran, bentuk kegiatan, kemitraan, dan luaran PkM memiliki legitimasi sekaligus relevan dengan bidang keilmuan Program Studi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 47. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi pijakan penting bagi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) karena PkM harus bertolak dari kompetensi keilmuan yang dikembangkan program studi. Oleh sebab itu, pengembangan pengabdian berbasis dunia usaha dan dunia industri (DUDI) tidak menghilangkan karakter HTN/Siyasah, melainkan menjadikan DUDI sebagai ruang penerapan keilmuan dalam persoalan regulasi, kebijakan publik, kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, perizinan, perlindungan hak, ketenagakerjaan, tata kelola, dan hubungan antara pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha.
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Dalam regulasi tersebut, Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan didasarkan pada prinsip partisipatoris, pemberdayaan, inklusif, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabilitas, transparansi, kemitraan, keberlanjutan, profesional, dan manfaat.

Prinsip kemitraan dan keberlanjutan menjadi sangat relevan dalam roadmap ini. Pemerintah, masyarakat, dan DUDI ditempatkan sebagai mitra yang terlibat dalam proses identifikasi persoalan, penyusunan program, pelaksanaan pendampingan, evaluasi, serta pengembangan tindak lanjut. Dengan demikian, PkM tidak berhenti pada kegiatan pelatihan sesaat, tetapi diarahkan pada proses pemberdayaan dan perbaikan tata kelola yang dapat dipertahankan oleh mitra.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 juga memberikan arah bahwa PkM bertujuan memberdayakan masyarakat, mengembangkan potensi lingkungan, menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, serta mengembangkan potensi dan kepekaan sosial sivitas akademika. Ruang lingkup pengabdian mengikuti bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan. Hal ini memperkuat keharusan bahwa PkM berbasis DUDI pada Prodi HTN (Siyasah) tetap memiliki hubungan langsung dengan body of knowledge program studi.
4. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam dokumen roadmap yang dijadikan contoh, standar mutu internal pengabdian meliputi Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, serta Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Standar tersebut menjadi kerangka untuk memastikan PkM direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara terukur.
5. Kebijakan dan rencana strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta Fakultas Syariah yang berlaku. Roadmap PkM Prodi HTN (Siyasah) merupakan dokumen operasional yang harus memiliki keterkaitan dengan arah pengembangan universitas dan fakultas, terutama dalam pelaksanaan Tridharma, penguatan integrasi keilmuan, peningkatan kualitas kemitraan, dan kebermanfaatan perguruan tinggi bagi masyarakat.
6. Kekhasan keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) sebagai dasar substantif pengembangan PkM. Bidang Hukum Tata Negara, pemerintahan daerah dan desa, kebijakan publik, konstitusionalisme, demokrasi, hak konstitusional warga negara, tata kelola pemerintahan, serta Siyasah Syar'iyah menjadi perspektif yang mewarnai setiap program pengabdian.

Atas dasar tersebut, orientasi DUDI dalam roadmap ini bukan dimaksudkan untuk menggeser PkM ke arah pengabdian yang semata-mata berorientasi bisnis. Dunia usaha dan dunia industri ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan dan pembangunan yang bersinggungan langsung dengan regulasi, kewenangan, pelayanan publik, hak masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Posisi inilah yang menjadi titik temu antara kebutuhan DUDI dengan kompetensi Prodi HTN (Siyasah).

Keseluruhan dasar hukum tersebut selanjutnya menjadi landasan penyusunan tema, sasaran, indikator keberhasilan, luaran, serta tahapan roadmap 2024 - 2027. Implementasinya tetap perlu menyesuaikan peraturan dan kebijakan kelembagaan terbaru yang berlaku pada saat program PkM dilaksanakan.

2. Gambaran Umum

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan penelitian sebagai unsur Tridharma Perguruan Tinggi. Agar pelaksanaannya tidak bersifat sporadis, diperlukan roadmap yang memberikan gambaran terukur mengenai arah pengembangan PkM dalam jangka waktu tertentu. Roadmap berfungsi sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam menentukan tema, sasaran, mitra, bentuk kegiatan, indikator keberhasilan, dan luaran.

Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025–2028 dikembangkan dengan orientasi kemitraan bersama dunia usaha dan dunia industri tanpa menghilangkan unsur ke-HTN-an. Tema besarnya adalah “Penguatan Tata Kelola Hukum, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri Berbasis Hukum Tata Negara dan Siyasah.”

Orientasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa DUDI tidak berdiri terpisah dari sistem pemerintahan. Aktivitas dunia usaha berhubungan dengan regulasi, kebijakan pemerintah, pelayanan perizinan, administrasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan daerah dan desa, ketenagakerjaan, perlindungan masyarakat, serta berbagai bentuk kemitraan pemerintah dan sektor nonpemerintah. Persinggungan tersebut membuka ruang pengabdian yang luas bagi dosen dan mahasiswa HTN (Siyasah).

Dalam konteks pemerintahan desa, misalnya, BUMDes dapat menjadi mitra pengabdian dalam penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, hubungan

kewenangan dengan pemerintah desa, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada UMKM, fokus PkM dapat diarahkan pada literasi regulasi, akses pelayanan perizinan, kepastian hukum, serta pemahaman hubungan pelaku usaha dengan pemerintah dan konsumen. Sementara pada perusahaan, pengabdian dapat dikembangkan melalui tata kelola CSR/TJSL, partisipasi masyarakat, serta penguatan prinsip good governance.

Dengan konstruksi tersebut, PkM berbasis DUDI tetap dibedakan dari pengabdian yang berorientasi pada manajemen bisnis atau pemasaran. Titik berat Prodi HTN (Siyasah) berada pada dimensi hukum publik, regulasi, pemerintahan, kebijakan, hak konstitusional, tata kelola, partisipasi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Aspek usaha menjadi konteks penerapan keilmuan, bukan pengganti identitas disiplin.

Roadmap periode 2024–2027 disusun dalam empat tahapan yang berkesinambungan. Tahun 2024 diarahkan pada pemetaan dan pembangunan fondasi melalui identifikasi problematika hukum dan tata kelola DUDI. Tahun 2025 diarahkan pada penguatan kapasitas melalui literasi hukum dan tata kelola usaha. Tahun 2026 menjadi tahap inovasi dan implementasi model kemitraan pemerintah DUDI masyarakat. Tahun 2027 diarahkan pada hilirisasi, replikasi, dan keberlanjutan model pengabdian.

Sasaran program meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, BUMDes, BUMD, UMKM, koperasi, perusahaan, asosiasi usaha, komunitas masyarakat, kelompok pekerja, serta lembaga lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemilihan sasaran mempertimbangkan kesesuaian dengan kompetensi program studi, kebutuhan nyata mitra, potensi keberlanjutan, dan peluang terbentuknya kerja sama kelembagaan.

Pelaksanaan PkM didorong bersifat kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Dosen berperan sebagai pengembang konsep, fasilitator pemberdayaan, pendamping, dan penyusun model atau rekomendasi kebijakan. Mahasiswa memperoleh ruang untuk menerapkan pengetahuan mengenai regulasi, pemerintahan, kebijakan publik, dan Siyasah dalam situasi nyata. Pola tersebut sekaligus memperkuat keterhubungan antara pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan kerja sama.

Bentuk kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, klinik hukum dan regulasi, konsultasi kebijakan, edukasi hukum, penyusunan SOP, penyusunan policy brief, pendampingan pelayanan berbasis digital, penguatan tata kelola BUMDes, serta pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat. Bentuk kegiatan dipilih

berdasarkan masalah mitra dan diarahkan pada perubahan pengetahuan, keterampilan, tata kelola, atau kualitas layanan.

Luaran PkM tidak hanya berupa laporan kegiatan. Program diarahkan menghasilkan modul, panduan, media edukasi, SOP, policy brief, rekomendasi kebijakan, artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, dokumen kerja sama, dan model tata kelola. Pada akhir periode 2027, diharapkan terbentuk Model Pengabdian Masyarakat HTN–DUDI sebagai kekhasan Prodi HTN (Siyasah) yang dapat direplikasi dan dikembangkan pada periode roadmap berikutnya.

Nilai Siyasah Syar'iyah menjadi dimensi etis yang memperkuat roadmap. Prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, tanggung jawab, transparansi, partisipasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat menjadi landasan dalam membangun tata kelola yang baik. Dengan demikian, roadmap menghubungkan kompetensi hukum ketatanegaraan dengan nilai-nilai Siyasah dalam menjawab kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan DUDI.

B. Tujuan

Penyusunan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025–2028 bertujuan memberikan arah yang sistematis bagi pelaksanaan PkM berbasis DUDI dengan tetap mempertahankan identitas keilmuan HTN dan Siyasah. Secara khusus, roadmap ini bertujuan:

1. Menghasilkan dokumen resmi roadmap PkM Prodi HTN (Siyasah) periode 2024 - 2027 sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program PkM.
2. Menghasilkan rumusan PkM yang konkret meliputi tema prioritas, bentuk kegiatan, subjek dan sasaran PkM, mitra, indikator keberhasilan, serta luaran yang relevan dengan kompetensi Hukum Tata Negara (Siyasah).
3. Mengintegrasikan kompetensi HTN/Siyasah dengan kebutuhan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, terutama pada aspek regulasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, perizinan, hak konstitusional, ketenagakerjaan, BUMDes, CSR/TJSL, dan digital governance.
4. Mendorong terselenggaranya PkM yang partisipatoris, kolaboratif, akuntabel, transparan, profesional, bermanfaat, dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian sehingga memperoleh pengalaman penerapan keilmuan, analisis persoalan hukum dan kebijakan, komunikasi publik, serta pendampingan masyarakat.
6. Mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pembelajaran dosen melalui PkM serta menjadikan permasalahan yang ditemukan di masyarakat sebagai sumber pengembangan penelitian dan pembelajaran.
7. Memperluas jejaring kemitraan Prodi HTN (Siyasah) dengan pemerintah, BUMDes/BUMD, UMKM, koperasi, perusahaan, asosiasi usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Menghasilkan luaran yang terukur berupa publikasi, modul, panduan, SOP, policy brief, rekomendasi kebijakan, media digital, HKI, dokumen kerja sama, mitra binaan, dan model tata kelola.
9. Membangun kesinambungan PkM melalui tahapan pemetaan, penguatan kapasitas, inovasi, implementasi, hilirisasi, dan replikasi sehingga pada akhir periode terbentuk model pengabdian unggulan Prodi HTN (Siyasah).

C. Manfaat

Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025 - 2028 diharapkan memberikan manfaat akademik, kelembagaan, dan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat. Manfaat tersebut meliputi:

1. Bagi Program Studi, roadmap menjadi pedoman dalam menjaga konsistensi arah PkM, memperkuat kekhasan keilmuan HTN (Siyasah), membangun rekam jejak pengabdian yang terstruktur, dan mendukung pengembangan kerja sama serta peningkatan mutu program studi.
2. Bagi Dosen, roadmap memberikan kerangka untuk mengembangkan kegiatan pengabdian yang sesuai bidang keahlian, berkesinambungan, berbasis kebutuhan mitra, serta berpotensi menghasilkan publikasi dan produk keilmuan terapan.
3. Bagi Mahasiswa, roadmap menyediakan ruang pembelajaran berbasis pengalaman melalui keterlibatan dalam identifikasi masalah, analisis regulasi, edukasi hukum, pendampingan masyarakat, penyusunan rekomendasi, dan kolaborasi dengan pemerintah serta DUDI.
4. Bagi Pemerintah, roadmap dapat memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,

penyelesaian persoalan regulasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang responsif.

5. Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri, roadmap memberikan peluang pendampingan dalam aspek hukum publik dan tata kelola, antara lain pemahaman regulasi, akses pelayanan perizinan, kepatuhan hukum, hubungan dengan pemerintah dan masyarakat, tata kelola CSR/TJSL, serta penguatan akuntabilitas.
6. Bagi Masyarakat, roadmap diharapkan memperluas literasi hukum, meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, memperkuat partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, serta mendorong pelayanan dan tata kelola yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat.
7. Bagi pengembangan Tridharma, roadmap memperkuat hubungan timbal balik antara pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kerja sama. Temuan penelitian dapat dihilirkan melalui PkM, pengalaman pengabdian dapat memperkaya pembelajaran, dan persoalan lapangan dapat menjadi agenda penelitian.

Dengan demikian, keberadaan roadmap diharapkan tidak hanya menghasilkan keteraturan administratif dalam pelaksanaan PkM, tetapi juga membentuk identitas pengabdian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang memiliki dampak nyata. Empat bagian dalam Bab I ini menjadi landasan bagi penyusunan Bab II mengenai arah strategis, klaster, peta jalan tahunan, sasaran, indikator keberhasilan, dan luaran PkM periode 2025 - 2028.

BAB II

ROADMAP DAN ARAH STRATEGIS PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Arah Strategis Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

Arah strategis Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian memiliki kesinambungan dengan bidang keilmuan program studi sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sejalan dengan pola dokumen roadmap yang menjadi rujukan, arah strategis menjadi penghubung antara identitas program studi dengan peta jalan pengabdian, sasaran, indikator keberhasilan, dan luaran.

Pengembangan PkM berbasis DUDI tidak dimaknai sebagai pergeseran orientasi keilmuan menuju bisnis atau manajemen. DUDI ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang berhubungan erat dengan regulasi, kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, perizinan, tata kelola pemerintahan daerah dan desa, hak konstitusional, ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial perusahaan, partisipasi masyarakat, serta kebijakan pemerintah.

Atas dasar tersebut, arah strategis PkM Prodi HTN (Siyasah) periode 2025-2028 adalah membangun model pengabdian yang mampu mempertemukan tiga unsur utama, yaitu kompetensi akademik HTN/Siyasah, kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintah, serta kebutuhan tata kelola DUDI. Ketiga unsur tersebut dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan, pendampingan, advokasi kebijakan, literasi hukum, penguatan kapasitas, inovasi pelayanan, dan pengembangan model tata kelola.

Tema besar roadmap adalah “Penguatan Tata Kelola Hukum, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri Berbasis Hukum Tata Negara dan Siyasah.” Tema ini menjadi payung bagi seluruh kegiatan PkM selama empat tahun dan diturunkan ke dalam fokus tahunan yang berkembang secara bertahap dari pemetaan menuju hilirisasi.

B. Prinsip Pengembangan PkM HTN (Siyasah) Berbasis DUDI

1. Keilmuan: setiap kegiatan harus memiliki keterkaitan nyata dengan Hukum Tata Negara, pemerintahan, kebijakan publik, hak konstitusional, atau Siyasah.

2. Partisipatoris: mitra terlibat sejak identifikasi kebutuhan sampai evaluasi dan tindak lanjut.
3. Kolaboratif: PkM mendorong sinergi dosen, mahasiswa, pemerintah, masyarakat, dan DUDI.
4. Keberlanjutan: kegiatan disusun secara bertahap dan memungkinkan pendampingan serta replikasi.
5. Akuntabilitas dan kemanfaatan: program harus memiliki indikator perubahan dan luaran yang dapat dimanfaatkan mitra.
6. Integrasi Tridharma: hasil penelitian dapat dihilirkan melalui PkM dan temuan lapangan dapat memperkaya penelitian serta pembelajaran.

C. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk menjaga fokus sekaligus memberi ruang pengembangan tema yang dinamis, PkM Prodi HTN (Siyasah) berbasis DUDI dikelompokkan ke dalam enam klaster. Klaster ini menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam menentukan tema pengabdian, mitra, serta bentuk luaran.

1. Regulasi, Perizinan, dan Pelayanan Publik bagi DUDI

Pengabdian diarahkan pada peningkatan literasi regulasi, akses terhadap pelayanan perizinan, pemahaman kewenangan pemerintah, kepastian prosedur administrasi, serta penguatan kualitas pelayanan publik yang bersentuhan dengan pelaku usaha dan masyarakat.

2. Tata Kelola Pemerintahan Desa, BUMDes, dan Ekonomi Lokal

Fokus pada penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, relasi kewenangan pemerintah desa dengan BUMDes, partisipasi masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal dalam koridor hukum pemerintahan.

3. Hak Konstitusional, Ketenagakerjaan, dan Perlindungan Masyarakat

Mencakup edukasi dan pendampingan mengenai hak warga negara, perlindungan pekerja, akses pelayanan publik, perlindungan kelompok masyarakat dalam relasi dengan kebijakan pemerintah dan aktivitas DUDI.

4. Digital Governance dan Pelayanan Hukum bagi DUDI

Mengembangkan pendampingan transformasi pelayanan berbasis digital, literasi administrasi elektronik, akses informasi hukum, penyusunan SOP layanan, dan inovasi pelayanan pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses.

5. CSR/TJSL, Kebijakan Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan

Mendorong tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan yang partisipatif, tepat sasaran, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

6. Siyasa Syar'iyah, Good Governance, dan Etika Tata Kelola Usaha

Mengintegrasikan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, transparansi, partisipasi, dan perlindungan kepentingan publik dalam tata kelola pemerintahan dan kemitraan dengan DUDI.

D. Sasaran dan Mitra Pengabdian

Sasaran PkM dipilih berdasarkan relevansi persoalan dengan keilmuan HTN/Siyasah, kebutuhan mitra, potensi keberlanjutan, dan peluang pengembangan kerja sama. Mitra dapat meliputi pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa/kelurahan, BUMD, BUMDes, UMKM, koperasi, perusahaan, asosiasi usaha, kelompok pekerja, komunitas masyarakat, serta lembaga lain yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan DUDI.

E. Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat 2025-2028

Peta jalan disusun dalam empat tahapan: Pemetaan dan Fondasi (2025), Penguatan Kapasitas (2026), Inovasi dan Implementasi (2027), serta Hilirisasi dan Keberlanjutan (2028). Setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya sehingga kegiatan pengabdian tidak terputus, tetapi berkembang menuju model unggulan PkM HTN-DUDI.



Tahun	Tahapan	Tema Prioritas	Subjek/Mitra PkM	Fokus Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Luaran	Arah Ke-HTN-an
2024	Pemetaan & Fondasi	Pemetaan Problematika Hukum dan Tata Kelola DUDI	Pemda, Pemdes, BUMDes, UMKM, asosiasi usaha, komunitas	Pemetaan regulasi, perizinan, pelayanan publik, tata kelola BUMDes, kepatuhan hukum, dan relasi pemerintah-pelaku usaha.	Tersedia baseline persoalan, kebutuhan mitra, lokasi prioritas, dan jejaring awal PkM.	Peta masalah; database mitra; laporan; modul awal; artikel PkM.	Kewenangan pemerintahan, regulasi, pelayanan publik, hak warga negara.
2025	Penguatan Kapasitas	Literasi Hukum dan Penguatan Tata Kelola DUDI	UMKM, BUMDes, koperasi, pemerintah desa, perangkat daerah, perusahaan	Pendampingan legalitas/perizinan, tata kelola BUMDes, kontrak dan kepatuhan, perlindungan konsumen/pekerja, literasi kebijakan pemerintah.	Meningkatnya pemahaman hukum, kapasitas tata kelola, kepatuhan, dan akses mitra terhadap layanan	Modul; panduan; model pendampingan; publikasi; HKI; PKS/IA.	Kepastian hukum, good governance, perlindungan hak, hukum pemerintahan.

					pemerintah.		
2026	Inovasi & Implementasi	Kemitraan Pemerintah-DUDI-Masyarakat dan Digital Governance	Pemda, BUMD/BUMDes, perusahaan, industri, asosiasi usaha, komunitas	Regulatory assistance, SOP layanan, digitalisasi pelayanan, tata kelola CSR/TJSL, forum kolaborasi dan partisipasi masyarakat.	Teraplikasinya SOP/model layanan, meningkatnya kolaborasi multipihak dan kualitas partisipasi.	Policy brief; SOP; model tata kelola; media/aplikasi; artikel; HKI.	Kebijakan publik, partisipasi, akuntabilitas, administrasi pemerintahan.
2027	Hilirisasi & Keberlanjutan	Ekosistem Tata Kelola DUDI Berbasis Konstitusionalisme dan Siyasah	Pemda, DPRD, desa, BUMDes, DUDI, asosiasi profesi, masyarakat	Replikasi model, pembentukan mitra binaan, advokasi kebijakan, penguatan jejaring, pusat/klinik pendampingan hukum dan tata kelola.	Model direplikasi; kerja sama berkelanjutan; rekomendasi dimanfaatkan; terbentuk mitra binaan.	Model unggulan HTN-DUDI; rekomendasi kebijakan; MoA/IA; buku/HKI; mitra binaan.	Konstitusionalisme, siyasah syar'iyah, tata kelola kolaboratif, kemaslahatan.

F. Fokus Program Tahunan

2025 - Pemetaan dan Fondasi

1. Pemetaan hambatan regulasi dan pelayanan perizinan yang dihadapi UMKM/BUMDes.
2. Pemetaan problem tata kelola BUMDes dan hubungan kelembagaan dengan pemerintah desa.
3. Identifikasi kebutuhan literasi hukum, pelayanan publik, dan perlindungan hak bagi masyarakat serta pelaku usaha.
4. Penyusunan database mitra dan wilayah binaan potensial Prodi HTN (Siyasah).

2026 - Penguatan Kapasitas

1. Klinik literasi regulasi dan pelayanan perizinan bagi UMKM/BUMDes.
2. Pendampingan tata kelola BUMDes yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Edukasi hak dan kewajiban dalam hubungan ketenagakerjaan dan perlindungan masyarakat.
4. Pendampingan penyusunan dokumen tata kelola dan peningkatan kepatuhan hukum mitra.

2027 - Inovasi dan Implementasi

1. Penyusunan dan implementasi SOP pelayanan hukum/perizinan berbasis digital.
2. Pendampingan tata kelola CSR/TJSL yang partisipatif dan berorientasi kemaslahatan.
3. Forum kolaborasi pemerintah-DUDI-masyarakat untuk penyelesaian persoalan regulasi lokal.
4. Penyusunan policy brief dan model tata kelola kolaboratif berbasis HTN/Siyasah.

2028 - Hilirisasi dan Keberlanjutan

1. Replikasi model Desa/BUMDes/UMKM sadar hukum dan tata kelola.
2. Advokasi dan diseminasi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah/DPRD.
3. Pengembangan mitra binaan dan jejaring kerja sama berkelanjutan.
4. Pengembangan Model Pengabdian Masyarakat HTN-DUDI sebagai program unggulan Prodi.

G. Integrasi Dosen dan Mahasiswa

Pelaksanaan roadmap mengutamakan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam satu ekosistem pengabdian. Dosen berperan dalam perumusan pendekatan,

pendampingan, analisis hukum dan kebijakan, serta pengembangan luaran. Mahasiswa dilibatkan dalam pemetaan masalah, edukasi hukum, pengumpulan data kebutuhan mitra, pendampingan, penyusunan media, dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan tersebut sekaligus menjadi ruang pembelajaran kontekstual dan penguatan kompetensi lulusan.

H. Indikator Keberhasilan dan Luaran

Keberhasilan roadmap diukur tidak hanya dari jumlah kegiatan, tetapi dari kesesuaian PkM dengan bidang keilmuan, perubahan kapasitas mitra, keberlanjutan program, kualitas kolaborasi, serta pemanfaatan luaran. Indikator utama meliputi:

1. Meningkatnya proporsi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan klaster roadmap.
2. Meningkatnya jumlah PkM kolaboratif yang melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah, masyarakat, dan DUDI.
3. Meningkatnya jumlah mitra yang memperoleh manfaat terukur berupa peningkatan literasi hukum, tata kelola, kepatuhan, atau kualitas layanan.
4. Tersusunnya produk pengabdian berupa modul, panduan, SOP, policy brief, rekomendasi kebijakan, media digital, artikel ilmiah, dan HKI.
5. Meningkatnya jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti melalui kegiatan PkM nyata dan berkelanjutan.
6. Terbentuknya mitra binaan dan model PkM yang dapat direplikasi pada akhir periode roadmap.

I. Strategi Implementasi

1. Sinkronisasi tema PkM dosen dan mahasiswa dengan klaster roadmap pada awal setiap tahun akademik.
2. Penetapan mitra prioritas berdasarkan kebutuhan, kesesuaian keilmuan, dan peluang keberlanjutan.
3. Penguatan kerja sama melalui PKS/MoA/IA dan program tindak lanjut yang terukur.
4. Integrasi hasil penelitian dosen dengan kebutuhan pengabdian serta pemanfaatan temuan PkM untuk pengembangan penelitian dan pembelajaran.
5. Monitoring dan evaluasi tahunan dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan (Plan-Do-Check-Act/PDCA).

6. Diseminasi hasil PkM melalui publikasi, forum akademik, policy brief, media digital, dan penyampaian rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

J. Target Akhir Roadmap 2028

Target akhir periode 2025-2028 adalah terbentuknya Model Pengabdian Masyarakat HTN-DUDI sebagai kekhasan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Model tersebut ditandai oleh adanya tema pengabdian yang konsisten dengan keilmuan HTN/Siyasah, jejaring mitra pemerintah-DUDI-masyarakat, mitra binaan berkelanjutan, produk tata kelola dan rekomendasi kebijakan, keterlibatan aktif mahasiswa, serta luaran akademik yang terdokumentasi.

Dengan target tersebut, roadmap tidak hanya menjadi daftar tema tahunan, tetapi menjadi instrumen pengembangan kelembagaan Prodi. Keberhasilan roadmap diharapkan memperkuat kontribusi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam membangun tata kelola pemerintahan dan hubungan pemerintah-masyarakat-DUDI yang berkeadilan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

BAB III

PENUTUP

Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025-2028 disusun sebagai pedoman dan arah pengembangan kegiatan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa. Roadmap ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan PkM tidak bersifat parsial dan insidental, tetapi bergerak secara sistematis, terukur, berkesinambungan, serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan kompetensi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengembangan PkM berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam roadmap ini tidak dimaksudkan untuk menggeser karakter keilmuan Program Studi ke arah bisnis atau manajemen. DUDI ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan dan pembangunan yang memiliki hubungan erat dengan regulasi, kebijakan publik, kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, perizinan, hak konstitusional warga negara, ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan daerah dan desa, tanggung jawab sosial perusahaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan konstruksi tersebut, kekhasan Hukum Tata Negara dan Siyasah tetap menjadi landasan utama dalam seluruh program pengabdian.

Peta jalan pengabdian selama empat tahun dibangun secara bertahap. Tahun 2025 diarahkan pada Pemetaan dan Fondasi melalui pemetaan problematika hukum dan tata kelola DUDI. Tahun 2026 diarahkan pada Penguatan Kapasitas melalui peningkatan literasi hukum dan penguatan tata kelola DUDI. Tahun 2027 merupakan tahap Inovasi dan Implementasi melalui pengembangan kemitraan Pemerintah, DUDI, Masyarakat dan Digital Governance. Selanjutnya, tahun 2028 diarahkan pada Hilirisasi dan Keberlanjutan melalui pengembangan ekosistem tata kelola DUDI berbasis konstitusionalisme dan Siyasah.

Kesinambungan tahapan tersebut diharapkan mampu membentuk pola pengabdian yang berkembang dari identifikasi persoalan menuju pendampingan, penguatan kapasitas, penerapan inovasi, pengembangan model, dan pada akhirnya replikasi serta hilirisasi. Dengan demikian, setiap kegiatan PkM pada satu tahun tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses pencapaian target jangka menengah Program Studi.

Pelaksanaan roadmap ini memerlukan keterlibatan aktif dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pimpinan Program Studi dan Fakultas, serta dukungan berbagai mitra. Pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa/kelurahan, BUMD, BUMDes, UMKM, koperasi, perusahaan, asosiasi usaha, kelompok pekerja, komunitas masyarakat, dan lembaga lainnya merupakan mitra potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan tema dan kebutuhan pengabdian.

Keterlibatan mahasiswa dalam PkM juga menjadi bagian penting dari implementasi roadmap. Pengabdian menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan Hukum Tata Negara dan Siyasah dalam persoalan konkret di masyarakat. Melalui kegiatan pemetaan, edukasi hukum, pendampingan, analisis regulasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan kolaborasi dengan mitra, mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman akademik yang semakin kontekstual serta kemampuan untuk memahami relasi antara hukum, pemerintahan, masyarakat, dan DUDI.

Hasil pelaksanaan PkM selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan luaran yang dapat dimanfaatkan secara akademik maupun praktis. Luaran tersebut dapat berupa laporan PkM, modul, panduan, standar operasional prosedur, policy brief, rekomendasi kebijakan, media edukasi digital, artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, dokumen kerja sama, model tata kelola, serta terbentuknya mitra binaan yang berkelanjutan. Luaran PkM juga diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian sehingga memperkuat keterhubungan antarelemen Tridharma Perguruan Tinggi.

Implementasi Roadmap PkM 2025 - 2028 perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat ketercapaian program, kesesuaian kegiatan dengan kluster pengabdian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, kualitas kemitraan, kebermanfaatan program bagi masyarakat dan DUDI, serta keberlanjutan hasil pengabdian. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan perbaikan berkelanjutan melalui prinsip Plan, Do, Check, dan Act (PDCA), sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan roadmap periode berikutnya.

Dengan tersusunnya Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Berbasis DUDI Tahun 2025 – 2028, diharapkan:

1. Terwujudnya program Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang terarah, terukur, berkesinambungan, dan sesuai dengan kekhasan bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Siyasah.

2. Terbangunnya sinergi yang kuat antara Program Studi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam menyelesaikan persoalan regulasi, tata kelola, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta persoalan hukum dan pemerintahan lainnya.
3. Meningkatnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam PkM kolaboratif yang mampu menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, tata kelola, serta kualitas pelayanan pada masyarakat dan mitra DUDI.
4. Terdiseminasinya hasil penelitian, pemikiran, dan inovasi dosen serta mahasiswa kepada masyarakat dan mitra melalui kegiatan pengabdian yang aplikatif dan memiliki manfaat nyata.
5. Terwujudnya luaran PkM berupa publikasi, modul, panduan, SOP, policy brief, rekomendasi kebijakan, HKI, kerja sama kelembagaan, serta produk atau model tata kelola yang dapat dimanfaatkan dan direplikasi.
6. Terbentuknya jejaring dan mitra binaan yang berkelanjutan sebagai basis pengembangan kegiatan PkM Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
7. Terbentuknya Model Pengabdian Masyarakat dan DUDI sebagai kekhasan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan orientasi pada masyarakat yang taat hukum, DUDI yang berdaya, tata kelola pemerintahan yang baik, dan terwujudnya kehidupan bernegara yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan.

Pada akhirnya, roadmap ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis. Perubahan regulasi, perkembangan kebijakan pemerintah, transformasi dunia usaha dan dunia industri, perkembangan teknologi, serta perubahan kebutuhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Fleksibilitas tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka pencapaian tujuan utama, yaitu menjadikan pengabdian sebagai sarana aktualisasi keilmuan Hukum Tata Negara dan Siyasah yang memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah, masyarakat, dan DUDI.

Semoga Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025-2028 dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan pengabdian yang berkualitas, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Program Studi dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pemerintahan yang berkeadilan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.